



**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PADANG PANJANG**

**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ)**

2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan, rahmat dan hidayahnya sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini dapat diselesaikan.

Penyusunan laporan ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan yang disampaikan oleh Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami dengan senang hati menerima segala saran dan pendapat dari berbagai pihak demi lebih sempurnanya penyusunan laporan ini dimasa mendatang.

Semoga dengan laporan yang disampaikan ini berguna dan sebagai bahan evaluasi atas kinerja selama ini.

Padang Panjang, 2 Januari 2025

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup
Kota Padang Panjang



ALVI SENA, ST.MT
NIP. 19750825 200212 1 004

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah setelah tahun anggaran berakhir wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur, dan Laporan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing OPD, sebagai upaya penciptaan sistem pemerintahan yang baik (good governance) yang mengacu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sebagai OPD teknis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) setelah Tahun Anggaran berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka disusunlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, sebagai sumber utama bahan penyusunan LKPJ Walikota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024, dengan substansinya adalah laporan dari pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2024.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
PENDAHULUAN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG	1
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	6
A. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	6
1). Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	9
2). Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	9
BAB III PROGRAM UNGGULAN YANG DILAKSANAKAN OLEH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PADA TAHUN 2024	32
BAB IV TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN 2024	33
BAB V CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	35
BAB VI PENUTUP	36
A. Kesimpulan	36
B. Saran	36
LAMPIRAN: PRESTASI ATAU KEBERHASILAN YANG DICAPAI TAHUN 2024	38

BAB I
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PADANG PANJANG

Berdasarkan Perwako Perubahan ke tiga atas Perwako Nomor 18 tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Nomor 25 tahun 2024 tanggal 23 desember 2024. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang mengalami kenaikan dari anggaran sebelum perubahan Rp. 32.448.327.088,- setelah perubahan menjadi Rp. 32.916.987.291,- dan realisasi sebesar Rp.28.988.237.175,- atau 88,06% (Kondisi TMT 31 Desember 2024). Target Anggaran Pendapatan Tahun 2024 semula banyak Rp. 1.800.000.000,- , bertambah menjadi Rp. 2.000.000.000,- pada saat perubahan anggaran. Dari target pendapatan tersebut hanya terealisasi sebesar Rp. 378.397.000,- atau (18,92%). Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Uraian	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Kenaikan /Penurunan %
	Jumlah Rp	Jumlah Rp	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.800.000.000	2.000.000.000	111%
Retribusi Daerah	1.800.000.000	2.000.000.000	111%
Jumlah Pendapatan	1.800.000.000	2.000.000.000	111%
BELANJA DAERAH	32.448.327.088	32.916.987.291	101%
BELANJA OPERASI	22.608.431.719	23.351.102.061	103%
Belanja Pegawai	5.929.158.885	6.395.300.174	108%
Belanja Barang dan Jasa	14.279.272.834	14.075.801.887	99%
Belanja Bantuan Sosial	2.400.000.000	2.880.000.000	120%
BELANJA MODAL	9.839.895.369	9.565.885.230	97%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125.002.800	225.724.500	181%
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	9.714.892.569	9.340.160.730	96%
Jumlah Belanja	32.448.327.088	32.916.987.291	101%

Sumber Data : DPPA Dinas PerkimLH Tahun 2024

Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang (Kondisi TMT 31 Desember 2024)

Pada Tahun 2024 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang melaksanakan 15 (lima belas) Program, 24 (dua puluh empat) kegiatan dan 42 (empat

puluh dua) Sub Kegiatan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 32.448.327.088,- pada awal sebelum perubahan anggaran. Sementara setelah perubahan anggaran menjadi 14 (empat belas) Program, 23 (dua puluh tiga) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32.916.987.291,- dan realisasi sebesar Rp. 28.988.237.175,- atau 88,06% (Kondisi TMT 31 Desember 2024) dengan rincian anggaran untuk masing masing program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang
(Kondisi TMT 31 Desember 2024)

NO	OPD	Program/Kegiatan	Sumber Dana	Jumlah Anggaran	Realisasi	Presentase	
				(Rp)	(Rp)	%	
I	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	APBD	7.986.073.979	7.747.048.145	97,01%	
1)		Administrasi keuangan Perangkat Daerah	APBD	6.381.010.174	6.286.406.537	98,52%	
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	APBD	6.381.010.174	6.286.406.537	98,52%	
2)		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	APBD	23.500.000	23.500.000	100,00%	
1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	APBD	23.500.000	23.500.000	100,00%	
3)		Administrasi Umum Perangkat Daerah	APBD	534.118.550	515.247.389	96,47%	
1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	APBD	8.496.900	7.308.300	86,01%	
2		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	APBD	75.048.900	69.595.745	92,73%	
3		Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	APBD	17.929.350	17.623.650	98,29%	
4		Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	APBD	432.643.400	420.719.694	97,24%	
4)		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	APBD	140.323.100	133.575.000	95,19%	
1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	APBD	140.323.100	133.575.000	95,19%	
5)		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	APBD	586.153.155	555.244.426	94,73%	
1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	APBD	45.975.555	42.362.979	92,14%	
2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	APBD	540.177.600	512.881.447	94,95%	
6)		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	APBD	320.969.000	233.074.793	72,62%	
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	APBD	41.690.000	28.310.400	67,91%	
2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional dan Lapangan	APBD	172.757.000	121.124.800	70,11%	
3		Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	APBD	31.750.000	9.500.660	29,92%	
4		Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	APBD	74.772.000	74.138.933	99,15%	
II			PENGEMBANGAN PERUMAHAN	APBD	562.552.876	435.172.992	77,36%

NO	OPD	Program/Kegiatan	Sumber Dana	Jumlah Anggaran	Realisasi	Presentase
				(Rp)	(Rp)	%
1)		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	APBD	104.960.000	-	0,00%
1		Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	APBD	44.960.050	-	0,00%
2		Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	APBD	59.999.950	-	0,00%
2		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	APBD	457.592.876	435.172.992	95,10%
1		Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/ Penghuni Rumah Susun	APBD	457.592.876	435.172.992	95,10%
III		KAWASAN PERMUKIMAN	APBD	98.709.750	81.462.350	82,53%
1)		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	APBD	98.709.750	81.462.350	82,53%
1		Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	APBD	98.709.750	81.462.350	82,53%
2)		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	APBD	-	-	
1		Koordinasi Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran /Peremajaan/Permukiman Kumuh	APBD	-	-	0,00%
IV		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	APBD	3.049.192.250	3.001.712.900	98,44%
1)		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	APBD	3.049.192.250	3.001.712.900	98,44%
1		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Di Bawah 10 (sepuluh) Ha	APBD	3.049.192.250	3.001.712.900	98,44%
V		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	APBD	6.960.702.273	6.758.232.801	97,09%
1)		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	APBD	6.960.702.273	6.758.232.801	97,09%
1		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	APBD	6.960.702.273	6.758.232.801	97,09%
VI		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	APBD	118.244.300	116.392.730	98,43%
1)		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	APBD	118.244.300	116.392.730	98,43%
1		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	APBD	118.244.300	116.392.730	98,43%
2		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	APBD	-	-	0,00%
VII		PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	APBD	427.000.423	357.068.145	83,62%
1)		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	APBD	405.085.673	337.379.345	83,29%
1		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	APBD	10.265.200	8.468.550	82,50%
2		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	APBD	15.406.700	15.072.945	97,83%
3		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	APBD	379.413.773	313.837.850	82,72%
2)		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	APBD	21.914.750	19.688.800	89,84%
1		Pemberian Informasi Peningkatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada masyarakat	APBD	21.914.750	19.688.800	89,84%

NO	OPD	Program/Kegiatan	Sumber Dana	Jumlah Anggaran	Realisasi	Presentase
				(Rp)	(Rp)	%
VIII		PENGLOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	APBD	2.072.617.850	1.999.651.732	96,48%
1)		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota	APBD	2.072.617.850	1.999.651.732	96,48%
1		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	APBD	2.046.661.450	1.975.310.537	96,51%
2		Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan Keanekaragaman Hayati	APBD	25.956.400	24.341.195	93,78%
IX		PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	APBD	18.887.300	15.782.375	83,56%
1)		Penyimpanan Sementara Limbah B3	APBD	8.190.800	7.432.500	90,74%
1		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	APBD	8.190.800	7.432.500	90,74%
2)		Pengumpulan Limbah B3 daalam 1(satu) Daerah kabupaten/Kota	APBD	10.696.500	8.349.875	78,06%
1		Koordinasi, Sinkronisasi, Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Propinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	APBD	10.696.500	8.349.875	78,06%
X		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	APBD	19.385.300	16.738.805	86,35%
1)		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan /atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin RPPLH di terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	APBD	19.385.300	16.738.805	86,35%
1		Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	APBD	19.385.300	16.738.805	86,35%
XI		PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	APBD	-	-	0,00%
1)		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	APBD	-	-	0,00%
1		Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	APBD	-	-	0,00%
XII		PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	APBD	138.727.800	131.700.525	94,93%
1)		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	APBD	138.727.800	131.700.525	94,93%
1		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	APBD	12.077.850	11.352.825	94,00%
2		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	APBD	10.000.000	9.827.600	98,28%
3		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/ Komunitas/ Kelompok	APBD	116.649.950	110.520.100	94,75%
XIII		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	APBD	75.340.200	70.875.750	94,07%
1)		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten / Kota	APBD	75.340.200	70.875.750	94,07%
1		Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	APBD	75.340.200	70.875.750	94,07%

NO	OPD	Program/Kegiatan	Sumber Dana	Jumlah Anggaran	Realisasi	Presentase
				(Rp)	(Rp)	%
XIV		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	APBD	1.983.500	427.000	21,53%
1)		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	APBD	1.983.500	427.000	21,53%
1		Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	APBD	1.983.500	427.000	21,53%
2		Peyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	APBD	-	-	0,00%
XV		PENGLOLAAN PERSAMPAHAN	APBD	11.387.569.490	8.255.970.925	72,50%
1)		Pengelolaan Sampah	APBD	11.387.569.490	8.255.970.925	72,50%
1		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	APBD	63.289.500	35.118.935	55,49%
2		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	APBD	9.150.000	8.750.595	95,63%
3		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPS/SPA Kabupaten/Kota	APBD	5.284.078.900	2.223.900.616	42,09%
4		Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/ Kota atau TPA/TPST Regional	APBD	6.031.051.090	5.988.200.779	99,29%
		J u m l a h		32.916.987.291	28.988.237.175	88,06%

Sumber Data : LRA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup bulan Desember 2024

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yaitu melaksanakan sebagian urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yaitu Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Bidang Lingkungan Hidup.

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Pelayanan Dasar

1) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mendapat alokasi anggaran di tahun 2024 sebesar Rp.10.671.157.149,- dan realisasi Rp. 10.276.581.043,- atau 96,30% dilaksanakan oleh dengan Program, Kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

I. Program Pengembangan Perumahan

Program ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 562.552.876,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 435.172.992,- dan presentase pencapaian realisasi Keuangan sebesar 77,36% yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.

- 1) Sub kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana dengan dana sebesar Rp. 44.960.050,- Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan SPM Perumahan dan sebagai dana cadangan bantuan Pemerintah Daerah terhadap Korban Bencana, Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk sub kegiatan ini Rp. 0 (0%). rendahnya realisasi keuangan karena disebabkan kegiatan ini Bencana yang terjadi di Kota Padang Panjang pada tanggal 8 april 2024 , dimana penanganan bencana itu sesuai dengan SK Walikota Padang Panjang No. 96 Thn 2024, tertanggal 29 April 2024 dilaksanakan pada kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui dana dari Pusat.
- 2) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan dana sebesar Rp. 59.999.950,- Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan SPM Perumahan dan sebagai dana cadangan bantuan Pemerintah Daerah terhadap Korban Bencana, kegiatan fisik

mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk sub kegiatan ini Rp. 0 (0%). rendahnya realisasi keuangan disebabkan karena Bencana yang terjadi di Kota Padang Panjang pada tanggal 8 april 2024 , dimana penanganan bencana itu sesuai dengan SK Walikota Padang Panjang No. 96 Thn 2024, tertanggal 29 April 2024 dilaksanakan pada kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui dana dari Pusat.

2. Kegiatan Pembangunan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun dengan dana sebesar Rp. 457.592.876,-. Kegiatan ini bertujuan untuk untuk menunjang operasional pengelolaan Rusunawa. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100%. dan realisasi keuangan untuk sub kegiatan ini Rp. 435.172.992,- (95,10%). Hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharanya rusunawa dan terbayarnya upah pegawai harian (THL) .Rendahnya realisasi keuangan disebabkan karena realisasi belanja jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sesuai kebutuhan dan efesiensi anggaran

II. Program Kawasan Permukiman

Program ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 98.709.750,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 81.462.350,- dan presentase pencapaian realisasi Keuangan sebesar 82,53% yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.

- 1) Sub kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP dengan dana sebesar Rp. 98.709.750,-. Kegiatan ini bertujuan untuk penyusunan dokumen tahap awal dalam penyusunan dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh (RP2KPKPK) Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk sub kegiatan ini Rp. 81.462.350,- (82,53%) Hasil kegiatan ini berupa Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang tersusun/Tereview/Terlegalisasi

2. Penyelenggaraan Pemugaran /Peremajaan/Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

- 1) Sub kegiatan Koordinasi Singkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran /Peremajaan/Permukiman dengan dana sebesar Rp. 36.912.150,- pada anggaran awal sebelum perubahan ketika perubahan anggaran kegiatan ini dibatalkan dengan alasan

Anggaran ini sebagai biaya pendamping kegiatan pusat, sementara kegiatan pusat tersebut sudah tidak ada lagi.

III. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 3.049.192.250,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.001.712.900,- dan presentase pencapaian realisasi Keuangan sebesar 98,44 % yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut

1. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Di Bawah 10 (sepuluh) Ha dengan dana sebesar Rp. 3.049.192.250,- Kegiatan ini bertujuan untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh, Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100,00 % dan realisasi keuangan untuk sub kegiatan ini Rp. 3.001.712.900,- (98,44%). Hasil kegiatan ini berupa berkurangnya Jumlah rumah tidak layak huni .

IV. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 6.960.702.273,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.758.232.801,- dan presentase pencapaian realisasi Keuangan sebesar 97,09 % yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut

1. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian dengan dana sebesar Rp. 6.960.702.273,- Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas prasarana permukiman Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan untuk sub kegiatan ini Rp. 6.758.232.801,- (97,09 %). Hasil kegiatan ini berupa Terlaksananya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman di Kota Padang Panjang sebanyak 49 lokasi di 2 kecamatan yang terdiri dari 17 lokasi pengadaan jalan setapak, 16 lokasi pembuatan drenase dan 16 lokasi pembuatan DAM

2) Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup mendapat alokasi anggaran di tahun 2024 sebesar Rp. 14.259.756.163,- dan realisasi Rp. 10.141.592.757,- atau 71,12% dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

I. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 6.960.702.273,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.758.232.801,- dan presentase pencapaian realisasi Keuangan sebesar 97,09 % yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan pada awal anggaran. Pada saat perubahan anggaran dihilangkan. dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

- 1) Sub kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD dengan dana sebesar Rp. 118.244.300,- Kegiatan ini bertujuan untuk pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk sub kegiatan ini Rp. 116.392.730,- (98,43%). Hasil kegiatan ini berupa Laporan Induk KLHS RPJMD Kota Padang Panjang dan Ringkasan Eksekutif KLHS RPJMD Kota Padang Panjang.
- 2) Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang di hilangkan pada perubahan anggaran

II. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 427.000.423,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 357.608.145,- dan presentase pencapaian realisasi Keuangan sebesar 83,62 % yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

- 1) Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut dengan dana sebesar Rp. 10.265.200,- Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap capaian IKLH setiap tahunnya, melakukan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini Rp. 8.468.550 (82,50%). Hasil dari kegiatan ini meningkatkan capaian IKLH setiap tahunnya.

- 2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca , Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dengan dana sebesar Rp. 15.406.700,- Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan identifikasi kegiatan adaptasi dan mitigasi pada kampung iklim yang dibina dan diusulkan dan memberi inisiatif kepada lokasi proklamasi yang mencapai kategori Proklamasi utama sebagai penyemangat masyarakat di lokasi proklamasi tetap melaksanakan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini Rp. 15.072.945 (97,83%). Hasil dari kegiatan ini Meningkatnya Partisipasi Kota Padang Panjang dalam upaya mengatasi pemanasan Global.
 - 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan dana sebesar Rp. 379.413.773,- Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan penyelenggaraan tanggung jawab dan peran pengelolaan lingkungan hidup terutama meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kualitas lingkungan hidup Kota Padang Panjang, melalui bahan kimia dan peralatan pendukung pengujian dan pemantauan kualitas lingkungan Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini Rp. 313.837.850 (82,72%). Hasil dari kegiatan ini dalam bentuk pengujian sampel air dan udara dan tersedianya data informasi kualitas air tanah, air permukaan, limbah cair, udara ambien dan tanah untuk mengetahui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
2. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- 1). Sub kegiatan Pemberian Informasi Peningkatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada masyarakat dengan dana sebesar Rp. 21.914.750,- Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi aksi lingkungan penanaman pohon, sosialisasi terhadap pengujian air bersih dan pelaku usaha dalam peningkatan SDM terkait aturan dan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini Rp. 19.688.800,- (89,84 %). Hasil dari kegiatan ini pencegahan pengendalian kerusakan lingkungan hidup dapat berjalan sesuai dengan target-target kualitas lingkungan hidup.

III. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (HAYATI)

Program Ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 2.072.617.850,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.999.651.732,- dan presentase pencapaian realisasi Keuangan sebesar 96,48 % yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota

- 1) Sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan dana sebesar Rp. 2.046.661.450,-. Kegiatan ini bertujuan untuk Operasional dan Pemeliharaan Taman di Kota Padang Panjang Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini Rp. 1.975.310.537 (96,78%). Hasil dari kegiatan ini Terjaganya keindahan, keasrian dan kenyamanan ruang terbuka hijau Kota Padang Panjang, sehingga fungsi ekologis paru-paru kota dan fungsi sosial budaya ekonomi serta estetika ruang terbuka hijau kota bisa dioptimalkan.
- 2) Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan Keanekaragaman Hayati dengan dana sebesar Rp. 25.956.400,-. Kegiatan ini bertujuan untuk Pelatihan petugas Taman Kota dalam perawatan taman dan penataan taman kota padang panjang Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini Rp. 24.341.195 (78,06%). Hasil dari kegiatan ini Terlatihnya petugas taman dalam melakukan perawatan taman dan penataan taman Kota.

IV. Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbahn Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Program Ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 18.887.300,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.782.375,- dan presentase pencapaian realisasi Keuangan sebesar 83,56 % yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengumpulan Sementara Limbah B3

- 1) Sub kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3_dana sebesar Rp. 8.190.800,-. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3 pada Fasyankes. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini Rp. 7.432.500,- (90,74%).
2. Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 daalam 1(satu) Daerah kabupaten/Kota

- 1) Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Propinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan sebesar Rp. 10.696.500,-. Kegiatan ini bertujuan untuk Memperkuat dukungan komitmen pemerintah Kabupaten/Kota dalam program pengelolaan limbah B3 di Kota Padang Panjang dan meningkatkan kapasitas SDM dalam hal kewajiban pelaku usaha yang menghasilkan limbah B3 sesuai dengan izin yang dimiliki masing-masing pelaku usaha di Kota Padang Panjang. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini Rp. 8.349.875,- (78,06 %). Hasil dari kegiatan ini meningkatkan pengetahuan pengelolaan limbah B3 semua fasyankes di Kota Padang Panjang sehingga terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat bebas pencemaran limbah utamanya limbah B3.

V. Program Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program Ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 19.385.300,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.738.805,- dan presentase pencapaian realisasi Keuangan sebesar 86,35 % yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan /atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin RPPLH di terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan dana sebesar Rp. 19.385.300,-. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam persetujuan lingkungan yang dimiliki dan melaksanakan penegak hukum dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diwilayah Kota Padang Panjang. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini Rp. 16.738.805,- (86,35%). Hasil dari kegiatan ini berupa laporan pelaksanaa perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- 2) kegiatan ini Rp. 16.738.805,- (86,35%). Hasil dari kegiatan ini berupa laporan pelaksanaa perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

VI. Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH

Anggaran belanja pada Program ini dihilangkan pada perubahan anggaran karena belum jelasnya keberadaan masyarakat hukum adat di Kota Padang sehingga kegiatan ini belum bisa dilaksanakan.

VII. Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program Ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 138.727.800,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 131.700.525,- dan presentase pencapaian realisasi Keuangan sebesar 94,93 % yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1) Sub kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup dengan dana sebesar Rp. 12.077.850,-. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan sekitarnya dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini Rp. 11.352.825,- (94.00%). Hasil dari kegiatan ini berupa aksi lingkungan di masyarakat
 - 2) Sub kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup dengan dana sebesar Rp. 10.000.000,-. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini Rp. 9.827.600,- (98.28%). Hasil dari kegiatan ini terlaksana penyebaran informasi lingkungan hidup melalui radio dan berupa stiker, brosur, boklet dan digital printring spanduk.
 - 3) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/ Komunitas/ Kelompok dengan dana sebesar Rp. 116.649.950,-. Kegiatan ini bertujuan

meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini Rp. 110.520.100,- (94.75%). Hasil dari kegiatan ini berupa meningkatkan kesadaran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan

VIII. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program Ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 75.340.200,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 70.875.750,- dan presentase pencapaian realisasi Keuangan sebesar 94,07 % yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten / Kota
 - 1) Sub kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan dana sebesar Rp. 75.340.200,-. Kegiatan ini bertujuan memberikan apresiasi kepada masyarakat dan dunia pendidikan yang ikut berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diadakan baik pada tingkat Kota, Propinsi dan Nasional. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini Rp. 70.875.750,- (94,07 %). Hasil dari kegiatan ini berupa Pengembangan dan Pembinaan Sekolah Adiwiyata.

IX. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program Ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 1.983.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 427.000,- dan presentase pencapaian realisasi Keuangan sebesar 21,53 % yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
 - 1) Sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota dengan dana sebesar Rp. 1.983.500,-. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan Administrasi, Lapangan dan Membuktikan Kebenaran atas Pengaduan sebagai dasar melaksanakan penegakan hukum dibidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah Kota Padang Panjang. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini Rp. 427.000,- (21,53 %). Hasil dari kegiatan ini berupa Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota

X. Program Pengelolaan Persampahan

Program Ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 11.387.569.490,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.255.970.925,- dan presentase pencapaian realisasi Keuangan sebesar 72,50 % yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengelolaan Sampah

- 1) Sub kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan dengan dana sebesar Rp. 63.289.500,-. Kegiatan ini bertujuan pelatihan terhadap kelompok masyarakat terutama bagi pengelola bank sampah. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini Rp. 35.118.935,- (55,49%). Hasil dari kegiatan ini berupa Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat
- 2) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan dengan dana sebesar Rp. 9.150.000,-. Kegiatan ini bertujuan mengadakan rapat koordinasi dengan pihak terkait mengenai peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini Rp. 8.750.595,- (95,63%). Hasil dari kegiatan ini Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada
- 3) Sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPS/SPA Kabupaten/Kota dengan dana sebesar Rp. 5.284.078.900,-. Kegiatan ini bertujuan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini Rp. 2.223.900.616,- (42,09%). Hasil dari kegiatan ini berupa Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
- 4) Sub kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/ Kota atau TPA/TPST Regional dengan dana sebesar Rp. 6.031.051.090,-. Kegiatan ini bertujuan untuk pengolahan Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan,

Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini Rp. 5.988.200.779,- (99,29%). Hasil dari kegiatan ini berupa Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Capaian Kinerja Realisasi Program/Kegiatan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
						Fisik	%		
						(Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	I PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90,00%	90,00%	100,00%		
				Jumlah Dana	7.986.073.979	7.747.048.145	97,01%		
			1) Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%		
				Jumlah Dana	6.381.010.174	6.286.406.537	98,52%		
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	672 Orang/bulan	672 Orang/bulan	100,00%		
				Jumlah Dana	6.381.010.174	6.286.406.537	98,52%		
			2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100,00%	100,00%	100,00%		
				Jumlah Dana	23.500.000	23.500.000	100,00%		
			1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	47 Paket	47 Paket	100,00%		
				Jumlah Dana	23.500.000	23.500.000	100,00%		
			3) Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	90,00%	90,00%	100,00%		
				Jumlah Dana	534.118.550	515.247.389	96,47%		
			1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	100,00%		
				Jumlah Dana	8.496.900	7.308.300	86,01%		
			2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	100,00%		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
						Fisik	%		
						(Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Jumah Dana	75.048.900	69.595.745	92,73%		
			3 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket	24 Paket	100,00%		
				Jumah Dana	17.929.350	17.623.650	98,29%		
			4 Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan	100,00%		
				Jumah Dana	432.643.400	420.719.694	97,24%		
			4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100,00%	100,00%	100,00%		
				Jumah Dana	140.323.100	133.575.000	95,19%		
			1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	100,00%		
				Jumah Dana	140.323.100	133.575.000	95,19%		
			5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90,00%	90,00%	100,00%		
				Jumah Dana	586.153.155	555.244.426	94,73%		
			1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			100,00%		
				Jumah Dana	45.975.555	42.362.979	92,14%		
			2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			100,00%		
				Jumah Dana	540.177.600	512.881.447	94,95%		
			6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	90,00%	90,00%	100,00%		
				Jumah Dana	320.969.000	233.074.793	72,62%		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
						Fisik	%		
						(Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			100,00%		
				Jumah Dana	41.690.000	28.310.400	67,91%	Pemeliharaan berdasarkan kerusakan kendaraan operasional Kendaraan Dinas Jabatan	
			2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			100,00%		
				Jumah Dana	172.757.000	121.124.800	70,11%	Pemeliharaan berdasarkan kerusakan kendaraan operasional lapangan	
			3 Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Masin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			100,00%		
				Jumah Dana	31.750.000	9.500.660	29,92%	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berdasarkan Kerusakannya	
			4 Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Banguan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Lainnya			100,00%		
				Jumah Dana	74.772.000	74.138.933	99,15%		
			II PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	100,00%	100,00%	100,00%		
				Jumlah Dana	562.552.876	435.172.992	77,36%		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
						Fisik	%		
						(Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah	4 unit	-	100,00%		
				Jumlah Dana	104.960.000	-	100,00%		
			1 Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2 unit	-	100,00%		
				Jumah Dana	44.960.050	-	100,00%		
			2 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 unit	-	100,00%		
				Jumah Dana	59.999.950	-	100,00%		
			2 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagi pemilik/penghuni rumah susun	1 Laporan	1 Laporan	100,00%		
				Jumlah Dana	457.592.876	435.172.992	95,10%		
			1 Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/ Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 laporan	1 laporan	100,00%		
				Jumah Dana	457.592.876	435.172.992	95,10%		
			III KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengurangan kawasan kumuh	89,36%	95,52%	106,89%		
				Jumlah Dana	98.709.750	81.462.350	82,53%		
			1) Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah dokumen kebijakan kawasan kumuh yang tersedia	1 dokumen	1 dokumen	100,00%		
				Jumlah Dana	98.709.750	81.462.350	82,53%		
			1 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/	1 dokumen	1 dokumen	100,00%		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
						Fisik	%		
						(Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Terlegalisasi					
				Jumlah Dana	98.709.750	81.462.350	82,53%		
			2) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh	1 laporan				
				Jumlah Dana	-	-	0,00%		
			1 Koordinasi Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran /Peremajaan /Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	1 laporan				
				Jumlah Dana	-	-	0,00%		
			IV PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni	96,62%	92,25 %	95,48%		
				Jumlah dana	3.049.192.250	3.001.712.900	98,44%		
			1) Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab	70 unit	144 unit	100,00%		
				Jumlah Dana	3.049.192.250	3.001.712.900	98,44%		
			1 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	70 unit	144 unit	100,00%		
				Jumlah Dana	3.049.192.250	3.001.712.900	98,44%		
			V PROGRAM PENINGKATAN	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman dalam kondisi	86,24%	79,31%	91,96%		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	
						Fisik	%			
						(Rp)	(Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	baik						
				Jumlah dana	6.960.702.273	6.758.232.801	97,09%			
			1) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	2 kecamatan	2 kecamatan	100,00%			
				Jumlah Dana	6.960.702.273	6.758.232.801	97,09%			
			1 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	2 Lokasi	2 Lokasi	100,00%			
				Jumlah Dana	6.960.702.273	6.758.232.801	97,09%			
2	LINGKUNGAN HIDUP	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	VI PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan	100,00%	100,00%	100,00%			
				Jumlah Dana	118.244.300	116.392.730	98,43%			
			1) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS yang disusun	2 dokumen	1 dokumen	100,00%			
				Jumlah Dana	118.244.300	116.392.730	98,43%			
			1 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%			
				Jumlah Dana	118.244.300	116.392.730	98,43%			
			2 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun						
				Jumlah Dana	-	-	0,00%			
			VII PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN ATAU KERUSAKAN	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan	100,00%	100,00%	100,00%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
						Fisik	%		
						(Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			LINGKUNGAN HIDUP	hidup					
				Jumlah Dana	427.000.423	357.068.145	83,62%		
			1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara dan tanah yang dilakukan	2 jenis	2 jenis	100,00%		
				Jumlah Dana	405.085.673	337.379.345	83,29%		
			1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%		
				Jumlah Dana	10.265.200	8.468.550	82,50%		
			2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%		
				Jumlah Dana	15.406.700	15.072.945	97,83%		
			3 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%		
				Jumlah Dana	379.413.773	313.837.850	82,72%		
			2) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan	1 jenis	1 jenis	100,00%		
				Jumlah Dana	21.914.750	19.688.800	89,84%		
			1 Pemberian Informasi Peningkatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang	4 Laporan	4 Laporan	100,00%		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	
						Fisik	%			
						(Rp)	(Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			masyarakat	Dilaksanakan						
				Jumlah Dana	21.914.750	19.688.800	89,84%			
			VII PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas RTH Publik	4,23%	4,19%	99,05%			
				Jumlah Dana	2.072.617.850	1.999.651.732	96,48%			
			1) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota	Jumlah lokasi RTH publik yang dikelola	2 kecamatan	2 kecamatan	100,00%			
				Jumlah Dana	2.072.617.850	1.999.651.732	96,48%			
			1 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	53 Ha	53 Ha	100,00%			
				Jumlah Dana	2.046.661.450	1.975.310.537	96,51%			
			2 Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	40 Orang	40 Orang	100,00%			
				Jumlah Dana	25.956.400	24.341.195	93,78%			
			IX PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	32,00%	32,00%	100,00%			
				Jumlah Dana	18.887.300	15.782.375	83,56%			
			1) Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah penghasil limbah B3 yang dibina/ diverifikasi lapangan	24 fasyankes	24 fasyankes	100,00%			
				Jumlah Dana	8.190.800	7.432.500	90,74%			
			1 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	1 Laporan	100,00%			
				Jumlah Dana	8.190.800	7.432.500	90,74%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
						Fisik	%		
						(Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2) Pengumpulan Limbah B3 dalam 1(satu) Daerah kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3	2 kali	2 kali	100,00%		
				Jumlah Dana	10.696.500	8.349.875	78,06%		
			1 Koordinasi, Sinkronisasi, Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Propinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 dokumen	1 dokumen	100,00%		
				Jumlah Dana	10.696.500	8.349.875	78,06%	Target Kegiatan 2 kali sosialisasi telah dilaksanakan, sisa anggaran merupakan sisa belanja makanan dan minuman rapat, sisa Pengantian Uang Tranport Peserta sosialisasi dan sisa belanja ATK yang tidak teralisasi	
			X PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan	55,00%	55,17%	100,31%		
				Jumlah Dana	19.385.300	16.738.805	86,35%		
			1) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap	Persentase usaha/kegiatan yang diawasi	100%	100%	100,00%		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
						Fisik	%		
						(Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Usaha dan /atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin RPPLH di terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
				Jumlah Dana	19.385.300	16.738.805	86,35%		
			1 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	30 Badan Usaha	30 Badan Usaha	100,00%		
				Jumlah Dana	19.385.300	16.738.805	86,35%		
			XI PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Cakupan Fasilitas MHA terkait PPLH	50,00%				
				Jumlah Dana	-	-	0,00%		
			1 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	1 dokumen				
				Jumlah Dana	-	-	0,00%		
			1 Koordinasi, Sinkronasi,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,	1 Dokumen				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
						Fisik	%		
						(Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH					
				Jumlah Dana	-	-	0,00%		
			XII PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100,00%	100,00%	100,00%		
				Jumlah Dana	138.727.800	131.700.525	94,93%		
			1) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten /kota yang terlaksana	3 jenis kegiatan	3 jenis kegiatan	100,00%		
				Jumlah Dana	138.727.800	131.700.525	94,93%		
			1 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%		
				Jumlah Dana	12.077.850	11.352.825	94,00%		
			2 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat /Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	16 Orang	16 Orang	100,00%		
				Jumlah Dana	10.000.000	9.827.600	98,28%		
			3 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok	1 Lembaga	1 Lembaga	100,00%		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
						Fisik	%		
						(Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/ Komunitas/ Kelompok Masyarakat	masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH					
				Jumlah Dana	116.649.950	110.520.100	94,75%		
			XII PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	1 Jenis	1 Jenis	100,00%		
				Jumlah Dana	75.340.200	70.875.750	94,07%		
			1) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/ dunia usaha/dunia pendidikan/ filantropi yang dinilai kinerjanya	1 kelompok	1 kelompok	100,00%		
				Jumlah Dana	75.340.200	70.875.750	94,07%		
			1 Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1 Entitas	1 Entitas	100,00%		
				Jumlah Dana	75.340.200	70.875.750	94,07%		
			XI PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani	100,00%	100,00%	100,00%		
				Jumlah Dana	1.983.500	427.000	21,53%		
			1) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah dokumen penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	5 dokumen	3 dokumen	60,00%		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
						Fisik	%		
						(Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kabupaten/Kota						
			Jumlah Dana		1.983.500	427.000	21,53%		
			1 Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	5 Pengaduan	3 Pengaduan	60,00%		
			Jumlah Dana		1.983.500	427.000	21,53%		
			2 Peyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	5 Perkara				
			Jumlah Dana		-	-	0,00%		
			XV PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	98,00%	99,19%	101,21%		
			Jumlah Dana		11.387.569.490	8.255.970.925	72,50%		
			1) Pengelolaan Sampah	Persentase penanganan sampah	80,00%	81,32%	101,65%		
			Jumlah Dana		11.387.569.490	8.255.970.925	72,50%		
			1 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	7 kelompok	7 kelompok	75,00%		
			Jumlah Dana		63.289.500	35.118.935	55,49%	Realisasi Fisik pada kegiatan ini belum tercapai 100% dikarenakan kegiatan dilaksanakan pada perubahan Anggaran 2024 sehingga pendataan wajib retribusi sampah oleh petugas pendata dilapangan tidak	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
						Fisik	%		
						(Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								optimal dengan target 18.453 KK yang tercapai hanya 11.095 KK sementara realisasi keuangan baru mencapai 55,49%, karena pembayaran honor petugas pendataan tidak terbayarkan sepenuhnya.	
			2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%		
				Jumlah Dana	9.150.000	8.750.595	95,63%		
			3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPS/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	22 Unit	22 Unit	100,00%		
				Jumlah Dana	5.284.078.900	2.223.900.616	42,09%	Kapasitas TPA sungai Andok sudah overload sehingga membutuhkan alat pengolah sampa(Pirolisis), namun tidak teralisasi di sebabkan oleh :	1 .Membuat Roadmap Pengelolaan Persampahan Kota Padang Panjang 2. Memperpanjang g umur rencana

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
						Fisik	%		
						(Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								penempatan anggaran dan alat pengolah sampah di TPA sungai Andok belum bersertifikat milik pemko padang panjang 2. Waktu Penyusunan dokumen UKLUPL tidak cukup. Dalam penyusunan dokumen memerlukan waktu minimal ± 4 s/d 6 bulan dan persetujuan dokumen dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatra Barat 3. Alat pengolah sampah (Pirolisis) yang akan diadakan ternyata hanya memiliki efisiensi sebesar 50% dari 50 ton sehari timbulan sampah diTPA setiap harinya	dengan memperluas kawasan TPA Sungai Andok dan mensertifikatkan tanah menjadi aset Pemerintah Kota Padang Panjang 3.Mencari Alternatif Alat Pengolah sampah yang lain yang bisa mengurangi volume sampah yang ada.
			4 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/ Kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	15000-20000 Ton	18508,71 Ton	80,00%		
			Jumlah	Jumlah Dana	6.031.051.090	5.988.200.779	99,29%		
					32.916.987.291	28.988.237.175	88,06%		

BAB III
**PROGRAM UNGGULAN YANG DILAKSANAKAN OLEH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
 PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024**

Pada tahun 2024 yang menjadi program unggulan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah Program Kawasan Permukiman dan Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU), hal ini dapat kita lihat pada tabel berikut :

No	OPD	Program Unggulan	Keterangan
1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	a. Program Kawasan Permukiman dengan Indikator Kinerja : <ul style="list-style-type: none"> • Persentase Pengurangan Kawasan Kumuh b. Program Kawasan Permukiman dan Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan indikator Kinerja : <ul style="list-style-type: none"> • Persentase Ketersediaan Prasarana Sarana Umum (PSU) kawasan permukiman yang sesuai standard 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Pengurangan Kawasan kumuh mengalami pengurangan sebesar 95,59.% dari jumlah total kawasan permukiman kumuh yang ada di Kota Padang Panjang. • Ketersediaan PSU kawasan permukiman yang sesuai standar dicapai sebesar .79,31 % dari target 69,85 % yang harus dicapai pada tahun 2024.

BAB IV
TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN 2024

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Padang Panjang tahun 2023 telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rapat paripurna. Kemudian DPRD juga telah menyampaikan rekomendasi terhadap LKPJ tersebut.

Laporan tentang tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun 2024 dituangkan dalam format sebagai berikut:

Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Walikota Padang Panjang
Tahun 2024

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Permasalahan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Pemerintah Kota Padang Panjang harus lebih fokus dalam upaya peningkatan PAD Kota Padang Panjang, disektor persampahan misalnya, selama ini pemungutan retribusi hanya tertumpang di PDAM saat masyarakat membayar retribusi air bersih. Hal ini kami nilai tidak maksimal, karena produksi sampah tidak hanya di hasilkan oleh pemakai Jasa PDAM. Pengidentifikasian serta pengklasifikasian target retribusi sampah serta pengelompokan besaran tarif perlu segera diterapkan agar PAD disektor retribusi sampah dapat ditingkatkan, setidaknya untuk mengimbangi dana operasional yang cukup besar kita keluarkan untuk mengatasi permasalahan sampah ini	Pemungutan retribusi pelayanan kebersihan bagi kategori Rumah Tangga saat ini masih melekat pada pembayaran rekening air Perumdam Tirta Serambi, belum dilakukan pemungutan terhadap masyarakat yang menerima pelayanan kebersihan diluar rekening air Perumdam Tirta Serambi. Hal ini salah satunya dikarenakan belum tersedianya basis data wajib retribusi pelayanan kebersihan Kota Padang Panjang. Selain itu, pemungutan diluar rekening air Perumdam Tirta Serambi umumnya masih menggunakan metode tunai dan konvensional sehingga pemungutan belum dapat dilakukan dengan optimal.	Untuk kategori usaha/kegiatan, sudah dilakukan pemungutan secara tunai dan transfer langsung ke Rekening Kas Umum Daerah melalui petugas pungut Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Menindaklanjuti rekomendasi DPRD yang telah disampaikan, untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi serta pengelompokan besaran tarif retribusi pelayanan kebersihan, pada Tahun 2024 sudah dilakukan pendataan terhadap wajib retribusi pelayanan kebersihan Kota Padang Panjang untuk kategori Rumah Tangga dan usaha/kegiatan. Pendataan ini memberdayakan petugas yang ditunjuk oleh Kelurahan dengan total objek terdata sebanyak 11.144 objek menggunakan aplikasi berbasis android yang dikembangkan bersama Dinas Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya, data

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Permasalahan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			<p>yang sudah terkumpul ini akan dilakukan pengolahan dan penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah sehingga dapat dipungut sesuai dengan kategori dan tarif berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kedepannya, aplikasi pendataan yang sudah ada akan dilakukan peningkatan fungsi agar dapat dilakukan pemungutan secara non tunai.</p>

BAB V

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Pada Tahun 2024 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang tidak menerima tugas pembantuan dan penugasan

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan

Secara umum dapat disampaikan bahwa pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang selama Tahun Anggaran 2024 dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun masih terdapat target kinerja yang tidak tercapai, hal ini terjadi karena Efisiensi Anggaran serta Kapasitas TPA sungai Andok sudah overload sehingga membutuhkan alat pengolah sampa(Pirolisis), namun tidak teralisasi di sebabkan oleh :

1. Tanah untuk penempatan anggar dan alat pengelolah sampah di TPA sungai Andok belum bersertifikat milik pemko Padang Panjang.
2. Waktu Penyusunan dokumen UKL-UPL tidak cukup. Dalam penyusunan dokumen memerlukan waktu minimal \pm 4 s/d 6 bulan dan persetujuan dokumen dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatra Barat
3. Alat pengolah sampah (Pirolisis) yang akan diadakan ternyata hanya memiliki efisiensi sebesar 50% dari 50 ton sehari timbulan sampah diTPA setiap harinya

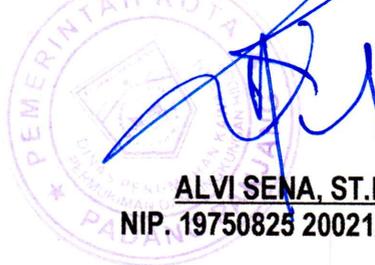
B. Saran/Rekomendasi

Melalui LKPJ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan LKPJ Walikota Padang Panjang Tahun 2024. Untuk lebih mengoptimalkan sinkronisasi program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan dengan perencanaan yang telah disusun, diharapkan kedepan lebih baik dan maksimal dalam menyukseskan tujuan, sasaran serta kewenangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Demikianlah LKPJ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang tahun

2024 ini disampaikan, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Padang Panjang, 2 Januari 2025

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

A handwritten signature in blue ink is written over a purple circular official stamp. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA PADANG' and 'DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP'. The signature is a stylized, cursive script.

ALVI SENA, ST.MT
NIP. 19750825 200212 1 004

LAMPIRAN

Prestasi pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024

No	OPD	Tanggal	Prestasi	Keterangan
1	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	2 Oktober 2024	Pusat	<p>Adiwiyata Nasional:</p>  <p>JAKARTA, 2 OKTOBER 2024</p>
				1. SDN 5 Padang Panjang Barat
				2. MTsS DMP Diniyyah Putri
2	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	11 Nofember 2024	Provinsi	<p>Adiwiata Propinsi :</p>  
				1. SMP 2 Padang Panjang
				2. SMP 4 Padang Panjang
				3. SDN 14 Padang Panjang Barat
				4. SDN 15 Padang Panjang Barat
				5. SDN 1 Padang Panjang Timur
3	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	30 Desember 2024	Kota	<p>Adiwiata kota :</p> 
				1. SDN 9 Padang Panjang Timur
				2. SDN 7 Padang Panjang Barat
				3. SDIT Tahfidz Mhd. Syarif

4	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	19 Desember 2024	Kota	Serambi Geoportal: Juara III Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Geospasial 
---	---	---------------------	------	--